

**PERAN INTELEKTUAL DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI DI INDONESIA
PASCA ORDE BARU
(Studi Pada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1997-1999)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Sosiologi

Oleh:

WAHYU HIDAYAT

NIM. 10540017

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2015



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Masroer, S.Ag., M.Si
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddindan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. WB.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Hidayat

NIM : 10540017

Judul Skripsi : Peran Intelektual Dalam Membangun Demokrasi di Indonesia
Pasca Orde Baru (Studi Pada Pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Islam Periode 1997-1999)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Sosiologi Agama.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Januari 2015

Masroer, S.Ag., M.Si
NIP. 19691029 200501 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 10540017
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : Gendeng GK IV/ 443, Baciro, Kecamatan Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
No. Telp/ Hp : 081328278190 – 085768688484
Judul Skripsi : Peran Intelektual Dalam Membangun Demokrasi di Indonesia
Pasca Orde Baru (Studi Pada Pengurus Besar Himpunan
Mahasiswa Islam Periode 1997-1999)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan karya plagiasi dari hasil karya orang lain.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2015

Yang Menyatakan,



Wahyu Hidayat
NIM: 10540017



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/331/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Peran Intelektual Dalam Membangun Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Pada Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1997-1999)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wahyu Hidayat
NIM : 10540017
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Januari 2015
Nilai munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Masroer, S.Ag., M.Si
NIP: 19691029 200501 1 001

Penguji

Dr. Moh. Soehadha, S.Sos., M.Hum
NIP. 197204 1719993 1 003

Penguji II

Dr. Muhammad Amin, Lc., MA
NIP. 19630604 199203 1 003

Yogyakarta, 05 Februari 2015

Dekan



Dr. H. Syaifan Nur, MA.
NIP. 19620718 198803 1 005

HALAMAN MOTTO

Q.S Al-an'aam 6: 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya : “Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Skripsi ini untuk:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK

Praktik demokrasi di Indonesia telah menjadi suatu keharusan, bahkan telah menjadi realitas sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran intelektual yang dilakukan oleh Pengurus Besar HMI Periode 1997-1999 merupakan upaya dalam membangun iklim demokratis di Indonesia. Dinamika sosial politik yang terjadi di era reformasi 1998 telah membawa dampak yang besar bagi perkembangan demokrasi. Hari ini kita dapat menikmati keterbukaan dalam menyampaikan suara, berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan pers tanpa ada rasa takut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi. Peran intelektual HMI dalam membangun demokrasi di Indonesia pasca orde baru dan pengaruhnya dalam demokrasi di Indonesia yang dikaji lebih mendalam melalui teori konstruksi sosial Peter L Berger.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa pada proses konstruksi pemahaman demokrasi dilakukan oleh Pengurus Besar HMI dengan melakukan diskusi, pelatihan kepemimpinan dan pembuatan jurnal. Pemahaman ini kemudian dilegitimasi yang disandarkan pada Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Kemudian diinternalisasikan dalam rumusan RUU Politik. Sedangkan pengaruhnya terhadap dinamika demokrasi di Indonesia yakni sebagai pendukung ideologi Pancasila, membangun sistem politik yang pro-demokrasi dan pembangunan *Civil Society*. Dengan terlibatnya orang-orang HMI di dalam pemerintahan, telah menjadi pekerja langsung membangun sistem demokrasi. Kedekatan HMI dengan negara dibangun atas kesamaan ide dan gagasan, terutama bagi alumni yang telah duduk di legislatif, yudikatif dan eksekutif. HMI sebagai organisasi keagamaan yang berbasis Islam mampu menerima demokrasi sebagai ajaran Islam. Penelitian ini menjadi antitesis dari kelompok-kelompok yang menolak demokrasi. HMI menerima bahkan mendorong demokrasi demi untuk kepentingan nasional. Kontribusi pemikiran dan kepemimpinan melalui keterlibatan elit-elitnya di dalam membangun demokrasi dan pergumulan penegakan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: *Demokrasi, Intelektual, HMI, Reformasi.*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Puji dan Syukur atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta Sholawat beserta Salam penulis haturkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini dan selama studi ini, banyak pihak yang telah membantu baik berupa moril maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Syaifan Nur, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Masroer, S.Ag., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan pelajaran bagi penulis;
5. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Periode 2010-2014, yang telah banyak membantu selama masa studi.
6. Bapak Suwindono dan Ibu Winarni, sebagai orang tua yang terus meluangkan setiap waktunya untuk mendo'akan penulis, serta kakak dan adek-adek yang mendorong penulis untuk terus belajar.
7. Om Joko Widodo dan Tante Mutriyati, yang telah membimbing selama penulis menempuh studi di Yogyakarta.
8. Adinda Liannisa Mandasari, terima kasih telah berbagi waktu.

9. Keluarga Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Yayasan Amal Insani (YAI) yang telah banyak membantu dalam proses masa studi dan skripsi.
10. Keluarga Besar organisasi yang selama ini menjadi tempat belajar, berproses, bergaul dan berteman; Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, DPD KNPI DIY, DPD KNPI Kota Yogya, HMI Cabang Yogya, HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga, HMI Komfak Ushuluddin, LAPMI Ushulliyah, DPP Partai Pencerahan UIN Sunan Kalijaga, Forum Lingkar Delapan, DKD Forsis DIY, IKPMDI Yogyakarta, PC OPI Kota Yogyakarta, DPD KMI DIY, HIPMALA Yogyakarta, Asrama Mahasiswa Lampung-Yogyakarta, HIPMATUBAYO, GALASITUBARAYO.
11. Kepada teman-teman yang terlalu banyak jika saya sebutkan, terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya. Semoga Ridho Allah SWT senantiasa menyertai kita. Amin.

Yogyakarta, 21 Januari 2015



Wahyu Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN SURAT PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	17
F. Metodologi Penelitian.....	34
G. Sistematika Pembahasan.....	38
BAB II. PERGULATAN HMI DALAM SEJARAH KEINDONESIAAN	
A. Sejarah Kelahiran HMI	39
B. Periodisasi Dinamika Organisasi	44
C. Garis Ideologi Organisasi	54
D. Struktur Kekuasaan Organisasi	57
E. Sistem Keanggotaan dan Kaderisasi.....	61
BAB III. DEMOKRASI SEBAGAI REALITAS SOSIAL	
A. Sejarah Demokrasi di Indonesia.....	65
B. Praktik Demokrasi di Indonesia	68
C. Peran Intelektual PB HMI Periode 1997-1999	74
D. Demokrasi Sebagai Realitas Sosial.....	86
BAB IV. HMI DALAM DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA	
A. Pendukung Ideologi Negara	92
B. Mendorong Sistem Politik yang Pro-Demokrasi	95
C. Pembangunan <i>Civil Society</i>	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam sejarah dinamika politik di Indonesia, terjadi transisi kekuasaan dari negara otoriter yang didominasi militer ke sistem demokrasi sipil. Transisi kekuasaan tersebut merupakan akhir dari kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 yang memimpin lebih dari 32 tahun. Mundurnya Soeharto adalah awal dari runtuhnya rezim Orde Baru menuju Era Reformasi. Transisi kekuasaan tersebut berdampak pada perubahan politik secara dramatis di Indonesia, semua menjadi saksi masuknya situasi yang disebut sebagai liberalisasi politik.¹

Pada pengalaman banyak negara maju, proses transisi demokrasi pada umumnya selalu dimulai dengan liberalisasi politik.² Hal ini terjadi di tahun pertama reformasi, yakni munculnya lebih dari 100 partai yang didirikan, yang akhirnya hanya 48 partai yang berkontestasi pada pemilu 1999. Namun, tidak berarti reformasi hanya mengenai partai politik *an sich*. Reformasi terus

¹ Liberalisasi politik sesungguhnya terlahir ketika Karl Manheim, pada 1930-an, mengintrodusasi apa yang disebutnya sebagai *community spiral*. Konsep Manheim mengajak kita agar suatu komunitas dipahami sebagai spiral dan atau terjemahan dari interaktif, dinamis, bergerak terus, yang kemudian menemukan titik singgungnya dengan Adam Smith yang mentransformasikan "keharusan" menumbuhkan perekonomian rakyat dalam setiap komunitas yang direkayasa elite politik oligarkis. Sehingga, adanya kesenyawaan antarpolitik dalam artian sistem dengan ekonomi (*fluktuation inward looking*) yang kohesif bagi komunitas tersebut. Pada titik ini, barangkali penjelasan paling urgen bagi kita mengapa liberalisasi politik atau politik liberal tak terhindar karena barang siapa menolaknya ia menjadi kerdil.

² As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*, Jakarta: LP3ES, 2012. Hlm, viii.

berkembang secara luas, yakni terbentuknya pemerintahan yang bersih dari segala KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), adil dan demokratis.³

Perubahan tersebut telah membuka jalan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak aktif dalam menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers dan kebebasan untuk menyuarakan kepentingan yang memadai. Meski perubahan tersebut baru pada penataan institutionalnya misalnya kearah yang lebih demokratis dan terdesentralisasi, karena sifat dari relasi kekuasaan (*power relations*) yang menopang rezim yang lama tidak mengalami perubahan yang fundamental.⁴

Paling tidak masa transisi tersebut merupakan langkah awal untuk memasuki masa demokrasi kembali setelah sebelumnya mengalami sistem demokrasi pada tahun 1950-an. Hal yang paling menonjol untuk menunjukkan demokrasi yakni amandemen UUD 1945 yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, penghapusan dwi fungsi ABRI secara total, diberlakukannya otonomi daerah, pemilihan presiden secara langsung pemilu 2004 dan diratifikasi HAM dalam UUD 1945 versi amandemen.⁵

Namun, para tokoh reformasi tidak menyadari tentang pelaksanaan prinsip demokrasi terutama mengenai platform bersama yang merupakan konsensus para elit tentang masa depan demokrasi. Kosentrasi elit disibukkan dengan mekanisme dalam meruntuhkan rezim, sehingga belum sempat

³ Sudirman Tebba, *Islam Menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001. Hlm, xiii.

⁴ Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2005. Hlm, xxvi.

⁵ Lihat *Kompas*, 25 Mei 2003 dan 17 Agustus 2003 dalam Sukron Kamil, *Islam dan Politik di Indonesia Terkini*, Jakarta: PSIA, 2013. Hlm, 22.

memikirkan kehidupan politik dan sosial pasca rezim otoritarian harus ditata dan dikelola.

Tindakan itu pada dasarnya lebih didasarkan pada keinginan cepat atau ambisi untuk segera menciptakan era baru yang jauh berbeda dibandingkan era sebelumnya.⁶ Sehingga yang terjadi, di tengah euforia liberalisasi politik dan desakan untuk pelaksanaan pemilu, elit-elit politik malah beramai-ramai membentuk partai dengan menempatkan tokoh-tokoh masyarakat masuk dalam struktur politik.

Proses transisi menuju reformasi demi mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis sangatlah menyita perhatian publik Indonesia, baik dari kalangan intelektual dan masyarakat biasa. Salah satu kelompok intelektual yang paling menyuarakan demokrasi adalah mahasiswa yang memiliki tanggung jawab, yang tidak hanya lulus dari perguruan tinggi saja, tetapi melibatkan diri dalam persoalan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan,⁷ dan lingkungan masyarakatnya. Sebagaimana seperti yang diungkapkan Hariman Siregar seorang Ketua BEM UI 1974,

Gerakan mahasiswa lebih dinilai sebagai gerakan sosial karena sifatnya memang tidak langsung ingin merebut kekuasaan atau menjadi agen dari suatu kekuatan politik tertentu untuk merebut kekuasaan, jadi gerakan mereka lebih bersifat kekuatan moral dengan isu-isu yang dapat menyatukan berbagai kepentingan masyarakat sehingga memperoleh dukungan yang luas.⁸

⁶ As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*, Hlm. ix.

⁷ Yozar Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981. Hlm, 28.

⁸ Hariman Siregar, *Gerakan Mahasiswa Indonesia, Pilar Kelima Demokrasi*, Jakarta: Teplok press, 2013. Hlm, 26-27.

Dalam sejarah bangsa ini, peranan mahasiswa di Indonesia sangat besar, seperti aksi demonstrasi dalam menurunkan Soeharto sebagai bagian dari perjuangan moral mahasiswa dalam keikutsertaannya memperjuangkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Gerakan mahasiswa seharusnya tidak berhenti sebagai gerakan moral dan gerakan menumbangkan rezim tirani, tetapi juga harus merebut dan membangun kekuasaan baru.⁹

Dalam konteks politik, gerakan mahasiswa dalam membangun kekuasaan selalu terkait dengan tuntutan untuk memperjuangkan nilai-nilai prinsip demokrasi. Mereka harus mampu merebut kepemimpinan dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan politik yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Meskipun kelompok intelektual muda tersebut mengusung ideologi berbeda-beda yang tumbuh dalam masyarakat.

Salah satu gerakan mahasiswa yang dalam keberadaan realitas sosial-politik di Indonesia memiliki andil yang cukup besar, bahkan tidak bisa dipandang sebelah mata adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Sebagai salah satu kelompok gerakan mahasiswa Islam, HMI telah melakukan gerakan sosialnya sebagai kontrol sosial dan moralnya. Organisasi ekstra-universitas terbesar di Indonesia dan memiliki massa potensial yang sewaktu-waktu dapat digerakkan melakukan *pressure* maupun dukungan politik.¹⁰ Hal ini pernah

⁹ Indra Kusumah, *Gerakan Politik Mahasiswa*, dalam *Republika*, 15 Desember 2004. Hlm, 4.

¹⁰ Dalam setiap kongres HMI, Pengurus Besarnya melaporkan bahwa jumlah anggota HMI rata-rata diatas 100 ribu orang. Angka ini sebenarnya menunjukkan jumlah yang besar bagi suatu organisasi mahasiswa. Jumlah anggota yang besar dan organisasi yang solid adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas tuntutan kelompok kepentingan. Lihat Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981. Hlm, 56 dan Hasanuddin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Kelompok Studi Lingkaran dan Pustaka Pelajar, 1996. Hlm, 4.

dilakukan oleh HMI, sebagai organisasi yang mampu menggerakkan kadernya untuk menandingi organisasi revolusioner seperti yang dimiliki oleh PKI.¹¹

Sebagaimana diketahui, perjuangan tegaknya demokrasi bagi HMI tidak bisa terlepas dari dua komitmen yakni komitmen keislaman dan keindonesiaan.¹² Kedua komitmen tersebut merupakan hasil dari pemikiran HMI yang tidak bisa terlepas dari realitas sosial-keagamaan yang ada di Indonesia pada saat itu. Seperti yang diungkapkan Lafran pane bahwa sikap akomodatif HMI tersebut merupakan kodrat bagi organisasi, karena menurutnya, HMI adalah nasionalis dahulu, baru kemudian Islam.¹³ HMI tumbuh pada masyarakat pluralis dan mejemuk.

Sikap akomodatif ini paling menonjol ketika periode demokrasi terpimpin, HMI selalu berusaha menunjukkan diri berada sejalan dengan garis revolusioner rezim orde lama. Pada waktu itu, Sulastomo menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1963-1966, bahkan sampai ketika Soekarno secara *de facto* tidak berkuasa lagi.¹⁴ HMI selalu mengambil sikap moderat, bahkan cenderung akomodasionis, ketika berhadapan dengan kebijaksanaan pemerintah terutama yang tampak represif hingga sampai akhir tahun 1970-an.

¹¹ Sikap HMI adalah tegas dan jelas. Mengenai pembubaran PKI tidak boleh balas dendam karena HMI hendak dibubarkan PKI, tetapi juga atas dasar pertimbangan ideologis. Sulastomo, *Hari-hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*, Jakarta: Kompas, 2008. Hlm, 160.

¹² Pada mulanya, ada dua Tujuan HMI didirikannya. Pertama, mempertegak dan mengembangkan agama Islam. Kedua, mempertinggi derajat rakyat dan Negara Indonesia. Maka sudah sangat jelas, HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkomitmen terhadap Islam dan Indonesia. Kedua komitmen tersebut sebagai manifestasi pemikiran keislaman dan keindonesiaan HMI dalam membumikan nilai-nilai yang dikandung dalam Islam sebagai azaz HMI. Lihat Agussalim Sitompul, *Historiografi Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (1947-1975)*, Jakarta: CV Misaka Galiza, 2008. Hlm, 13.

¹³ Lafran Pane, seorang pendiri HMI, menyebut bahwa sikap akomodasionis merupakan kodrat HMI. Lihat *Forum Pemuda* No. 41, Mei 1983.

¹⁴ Sulastomo, *Hari-hari yang panjang 1963-1966*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989. Hlm, 46.

Pada masa orde baru, HMI dihadapkan dengan situasi yang cukup berat yakni perdebatan mengenai rehabilitasi dari partai Masyumi, wacana pembaharuan pemikiran Islam oleh Nurcholis Majid, hingga kepada kebijakan pemerintah yang memaksa diberlakukannya azas tunggal Pancasila yang kemudian berdampak pada perpecahan di internal HMI, antara pendukung azas tunggal dan Islam. Bagi HMI yang tidak setuju dengan azas tunggal mengadakan Kongres dengan mendirikan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Ketika peralihan rezim orde baru ke era reformasi, HMI terlibat dalam demonstrasi yang turut membantu mempercepat peralihan kekuasaan. Habibie setelah disumpah sebagai Presiden oleh MPR, mengambil langkah cepat dengan mengangkat Syarwan Hamid sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru untuk segera mengangkat dan memberi mandat kepada Tim tujuh untuk merevisi undang-undang politik. Tim tujuh ini diketuai oleh Ryaas Rasyid, dengan anggota Ramlan Surbakti, Andi Mallarangeng, Afan Gaffar, Djohermansyah Djohan, Luthfi Mutty dan Anas Urbaningrum.¹⁵

Didalam tim tujuh tersebut, Anas Urbaningrum merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.¹⁶ Mengutip pandangan Edward Said (1998), bahwa Intelektual sebagai individu yang dikarunia bakat untuk merepresentasikan dan mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap atau filsafat kepada publik. Kapasitas intelektual Anas Urbaningrum telah dikenal

¹⁵ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem Keperwakilan di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG, 2009. Hlm, 100.

¹⁶ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem Keperwakilan di Indonesia Era Reformasi, ...* Hlm, 100.

sebagai pakar yang independen sehingga pengangkatannya bisa mencitrakan kompetensi dan netralitas dalam tim tujuh.¹⁷

Struktur kelembagaan tidak berlaku secara mekanis sebagai mesin. George C. Homas (1961) mengatakan bahwa kelembagaan itu merupakan perilaku manusia; yakni hubungan yang dijembatani oleh perilaku manusia.¹⁸ Jika Nurcholis Majid lebih dikenal dengan bobot intelektualitasnya sebagai Ketua Umum PB HMI pada era 1970-an, Anas justru menunjukkan kebolehannya selaku aktivis organisatoris sukses meletakkan HMI sebagai pemegang saham dalam proses perubahan arah politik kebangsaan pada zamannya.¹⁹

Negara demokrasi baru merupakan negara yang ideal dan terbuka.²⁰ Sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kesetaraan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dan implementasinya. Peran kaum intelektual di Indonesia sangat berpengaruh dalam membangun demokrasi ditengah masa transisi kekuasaan. Anas Urbaningrum membuktikan kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang politik dalam waktu dua bulan sebagai bagian dari tuntutan reformasi.

Berdasarkan atas permasalahannya yang telah diuraikan tersebut, penulis mencoba untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran intelektual

¹⁷ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel, Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi,* Hlm, 100.

¹⁸ George C. Homas, *Social Behavior: Its elementary Forms*, New York: Harcourt, Brace & World, 1961. Hlm, 23 dalam Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik, Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006. Hlm, 143.

¹⁹ Donny Syofyan, *Anas Urbaningrum, "A Man for All Seasons"* dalam Koran Sinar Harapan tanggal 5 Maret 2013.

²⁰ Anthony Giddens, *Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Terjemahan oleh Ketut Arya Mahardika dari *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, Jakarta: Gramedia, 2002, Hlm. 89.

dalam membangun demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru, studi pada Pengurus Besar HMI periode 1997-1999. Dengan pertimbangan, bahwa:

Pertama, Pengurus Besar HMI pada periode 1997-1999 bertepatan dengan menjelang pemilihan umum pertama pasca transisi kekuasaan. HMI memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang lebih demokratis. HMI pada saat itu terlibat dalam mengawal perjuangan reformasi pada Mei 1998 dan turut memberikan sumbangan pemikiran RUU Politik.

Kedua, pada masa transisi kekuasaan pemerintah dari Orde Baru ke Era Reformasi, Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999 dipimpin oleh Anas Urbaningrum. Sedangkan salah satu anggota dari Tim Tujuh ditugaskan untuk menyelesaikan RUU politik adalah Anas Urbaningrum. Sehingga, HMI secara organisatoris memiliki posisi yang strategis dan diuntungkan.

Ketiga, peralihan kekuasaan tentu cukup menguras tenaga dan pikiran. HMI sebagai organisasi gerakan mahasiswa dituntut mampu merespon peralihan zaman. Dengan sikap independensinya, HMI menjadi titik temu berbagai polarisasi kepentingan individu dan kelompok dimasa transisi kekuasaan. Sejak HMI mengikrarkan diri sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi, maka Islam harus benar-benar menjadi nafas bagi segenap kehidupan berorganisasi dalam rangka mewujudkan fungsi HMI sebagai *political force*. Mengingat pasca Orde Baru, perkembangan dinamika politik dan demokrasi di Indonesia cukup dinamis dan intensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran intelektual Pengurus Besar HMI Periode 1997-1999 dalam membangun demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru?
2. Apa pengaruhnya dalam dinamika demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini dengan sudut pandang sosiologi pengetahuan mencoba mendiskripsikan proses-proses dialektik dalam kelompok masyarakat (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 1997-1999). Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui peran Himpunan Mahasiswa Islam dalam membangun demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru.
2. Mengetahui pengaruh Himpunan Mahasiswa Islam dalam dinamika demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru.

Kegunaan Penelitian

1. Riset ini memberikan kontribusi studi perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia dalam konteks pengembangan Studi Sosiologi Agama.
2. Memberikan informasi studi kepustakaan hubungan agama, demokrasi dan politik dalam membangun Nasionalisme Indonesia.
3. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran

Islam UIN Sunan Kalijaga serta sebagai bahan rujukan dan bahan perbandingan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan tinjauan pustaka ini untuk melihat masalah ini pernah diteliti oleh orang lain, baik dari segi pendekatan maupun metodologinya. Ada beberapa karya tulis baik berupa buku, disertasi dan skripsi sebagai salah satu kebutuhan ilmiah.

Pertama, buku karya Mochammad Sodik, *Gejolak Santri: Aktivis Muda NU Merambah Jalan Lain*, yang merupakan hasil tesis di Program Pascasarjana UGM. Penelitiannya tersebut mengambil subjek Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKIS). Peneliti ingin menempatkan agama dalam konstruksi “kenyataan” sosial, tidak sebagai “konstruksi normatif. Dalam komunitas tersebut merupakan representasi dari kaum muda NU (Nahadlatul Ulama) yang mencoba membangun kontruksi pemikiran agama (Islam) yang berbeda dengan kultur dari mana mereka berasal. Hal ini memiliki kesamaan dengan organisasi HMI yang juga melakukan eksperimentasi dalam membangun konstruksi pemikiran Islam yang berada diluar kelompok organisasi keagamaan di Indonesia. Gerakan pembaharuan kaum muda NU (LKIS) menawarkan pola pemikiran “individualisme” dalam pengertian Berger dan Luckmann, yaitu *individual autonomy*, atau apa yang disebut Leonard Binder dengan *Islamic Liberalism*. Pola konstruksi pemikiran kritis (individualism) ini berbeda secara fundamental dengan pola pemikiran lama (kolektivisme) yang berkembang di lingkungan tradisional. Hal ini menandai,

apa yang disebut dengan Thomas Kuhn sebagai revolusi paradigma. Dengan demikian, kritisme yang muncul bukan sekedar kritisme di dalam, tetapi kritisme terhadap konstruksi pemikiran lama²¹.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada subjek kajiannya, penulis mengkaji organisasi HMI berdasarkan pertimbangan; pertama, HMI pada periode 1997-1999 dipimpin oleh aktivis yang progresif dan mengedepankan intelektual, kedua HMI dipandang sebagai organisasi dari unsur intelektual muslim yang memperjuangkan komitmen nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang intensif mengkaji persoalan sosial keagamaan dan politik kebangsaan.

Kedua, Buku karya Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa : Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)*. Buku ini menjelaskan dengan detail Pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam tentang Keislaman-Keindonesiaan tahun 1947-1997, baik hubungannya tentang situasi historis, sosiologis, politis dan pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI.²²

Pada periode pertama 1947-1965, HMI memupuk dan mengembangkan jiwa nasionalisme-kebangsaan yang baru berusia dua tahun dan memadukannya dengan semangat Islam yang universal. Pada periode kedua 1966-1984, HMI terlibat aktif dalam merintis, mendukung dan menegakkan orde baru. Bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

²¹ Mochamad Sodik, *Gejolak Santri : Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000. Hlm. 6-7.

²² Agussalim Sitompul, *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)*,Hlm. 475.

Pada periode ketiga 1985-1997, dengan tetap memelihara sifat kritisnya yang konstruktif dan proaktif serta menghindarkan diri dan menentang sikap-sikap apriori, reaktif dan destruktif. HMI menyampaikan berbagai pandangan dibidang politik, ekonomi, pendidikan, agama, demokrasi, HAM, pembangunan dan lain-lain kepada pemerintah orde baru, partai politik dan Golkar serta masyarakat luas.

Dalam buku tersebut, Agussalim Sitompul melihat HMI secara subjektif melihat pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bersifat personal (pribadi) dan penulis sendiri merupakan bagian dari HMI. Namun, penulis mampu mengkonstruksi sejarah yang bersifat dealektis pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI dengan menggunakan simbol serta idiom keagamaan yang berinteraksi dengan struktur realitas. Sebab itu, dalam buku *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Agussalim mengatakan;

Tidak berarti apa yang diuraikan, dibahas di sini itulah gambaran utuh HMI dan pemikiran-pemikirannya. Namun, masih memerlukan studi lanjut yang secara terus menerus harus dilakukan. Langkah awal ini merupakan permulaan usaha yang akan diikuti untuk masa-masa selanjutnya. Seperti bagaimana implikasi pemikiran-pemikiran HMI dikalangan mahasiswa, ilmuwan, cendekiawan, umat Islam dan bangsa Indonesia termasuk dalam kehidupan HMI sendiri, ini merupakan suatu studi sendiri yang menarik.²³

Perbedaannya penelitian ini yakni pada pendekatan yang dilakukan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode tersebut digunakan

²³ Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Perjuangan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997. Hlm. 352.

untuk meneliti sesuatu dari segi prosesnya, yakni proses HMI yang turut berjuang dalam mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan menyumbangkan ide-ide dan gagasannya.

Ketiga, buku karya Yudi Latif, Ph.D, *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan dan Kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX*. Mulanya buku ini adalah disertasi doctoral (S3) Yudi Latif di Australia National University (ANU) dengan judul *The Muslim Intellegensia of Indonesia: A Genealogy of Its Emergence in the 20th Century*. Di dalam buku ini, Yudi Latif membagi 6 (enam) generasi Intelegensia Muslim Indonesia.²⁴ Generasi pertama, *ulama-intelek* dari kaum reformis-modernis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap formasi generasi kedua intelegensia Muslim, tokoh yang berperan seperti Tjokroaminoto, Agus Salim dan sebagainya. Generasi kedua, Muslim Intelegensia (MI) dan *ulama-intelek* (baik dari kalangan reformis-modernis maupun tradisional) memainkan peran utama dalam pendirian dan kepemimpinan STI, Partai Masyumi dan Partai NU seperti M. Roem, M. Natsir dan sebagainya.

Generasi ketiga, intelegensia Muslim mempelopori perhimpunan-perhimpunan pemuda-pelajar pasca-kolonial. Tiga Siwa STI yaitu Anwar Harjono, Lafran Pane dan Jusdi Ghazali merintis berdirinya GPII, HMI dan PII. Organisasi HMI dan PII bersama dengan partai Masyumi dan NU menjadi katalis utama bagi keterkaitan intelektual politik antara generasi ketiga dan keempat. Generasi keempat merupakan mata rantai transmisi tradisi-tradisi politik dan intelektual dari generasi empat ke generasi kelima intelegensia

²⁴ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Hlm. 595.

muslim. Dibawah rezim represif-developmental orde baru, generasi ke empat terbelah menjadi dua faksi utama, yakni para penganjur gerakan dakwah Islam dan para penganjur gerakan liberal Islam atau yang sering disebut “gerakan pembaharuan”, dengan tokohnya Nurcholis Majid, Immaddin Abdurahim dan Djohan Effendi dll. Dalam perkembangan selanjutnya, HMI terpecah menjadi dua faksi setelah para penentang asas tunggal membentuk HMI bawah tanah yang bernama HMI-Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).

Generasi kelima, merupakan memontum berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dengan tokoh Habibie sebagai icon sentralnya, pengunduruan diri Soeharto dan digantikannya oleh Habibie pada tahun 1998 membuka peluang tokoh-tokoh ICMI memiliki pengaruh kekuasaan dan politik. Dan Generasi keenam, merupakan awal dari munculnya kelompok-kelompok dakwah Islamis (Lembaga Dakwah Kampus) dan HMI dan PMII menjadi transmisi utama kelompok intelektual Muslim pembaharu, yakni Ulil Abshar Abdalla, Saiful Mujani, Lutfi Assyaukanie dan sebagainya.

Hal utama yang membuat buku ini menjadi tinjauan yakni Yudi latif telah melacak sejarah Intelektual Muslim Indonesia beserta tokoh-tokohnya. HMI menjadi salah satu fokus kajiannya dengan melihat unsur HMI menjadi bagian dari intelektual muslim yang masuk dalam genealogi intelegensia Muslim Indonesia abad ke 20. Namun, di dalam buku ini cenderung mengkultuskan elit-elit HMI dimasanya dengan mengabaikan peran HMI yang sejak lahir sebagai organisasi kemahasiswaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek kajiannya, penulis lebih menekankan pada peran intelektual HMI sebagai bagian dari proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru.

Keempat, buku karya Hariqo Wibawa Satria, M.Si, *Lafran Pane: Jejak Hayat dan Pemikirannya*. Di dalam buku ini menjelaskan riwayat hidup Lafran Pane berikut pemikiran Keislaman – Keindonesiaannya khususnya tentang Intelektual Muslim Indonesia, kemudian mengenai proses pembentukan Intelektual Muslim Indonesia, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam.²⁵

Dalam kajiannya tersebut, menurut Lafran Pane bahwa Intelektual Muslim Indonesia memiliki 6 (enam) karakteristik utama yakni, 1) Meyakini kesempurnaan Islam, 2) Memiliki keseimbangan Ilmu pengetahuan dan keseimbangan hidup, 3) Sebagai pembaharu dalam segala hal kehidupan, 4) Menjadikan Keislaman-Keindonesiaan-Keilmuan sebagai titik tolak gerakan. 5) Pemersatu umat Islam dan pemersatu bangsa Indonesia, 6) Senantiasa menghabiskan umurnya untuk berjuang mengangkat harkat dan derajat rakyat Indonesia.²⁶

Buku yang mulanya adalah hasil penelitian skripsi ini merupakan upaya untuk menggali gagasan utama didirikannya HMI. Hal ini merupakan upaya untuk melacak dan mengkonstruksi setiap gagasan dan tindakan Lafran Pane sebagai seorang intelektual muslim. Perbedaan kajian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada objeknya. Peneliti mengambil objek HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang mewadahi kaum intelektual.

Kelima, skripsi Wahyu Minarno tentang Pemikiran Keislaman HMI Studi Naskah-naskah Doktrin Perjuangan HMI.²⁷ Skripsi tersebut memuat pemikiran keislaman HMI, yang selama ini telah terlibat didalam dinamika realitas sosial

²⁵ Hariqo Wibawa Satria, *Lafran Pane: Jejak Hayat dan Pemikirannya*. Jakarta: Penerbit Lingkar, 2011. Hlm. 7.

²⁶ Hariqo Wibawa Satria, *Lafran Pane: Jejak Hayat dan Pemikirannya*.... Hlm. 409.

²⁷ Wahyu Minarno, *Pemikiran Keislaman HMI, Studi Naskah-Naskah Doktrin Perjuangan HMI*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

keagamaan di Indonesia. Dari hasil penelitiannya tersebut, *pertama*, secara garis besar latar belakang pemikiran keislaman HMI tidak bisa dilepaskan dari tiga hal, yakni alasan utama didirikan HMI, keterlibatan HMI dalam dinamika keummatan dan kebangsaan di Indonesia dan perubahan serta perkembangan yang terjadi hampir pada setiap aspek di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Kedua*, pemikiran keislaman HMI dapat dikategorikan sebagai pemikiran keislaman yang bercorak substantif, proaktif, inklusif, integratif, modernis dan ilmiah. Esensi Islam dalam pandangan HMI mengandung tiga prinsip pokok yakni Tauhid, kemanusiaan dan keadilan. *Ketiga*, kelemahan dan kekurangan HMI dalam hal pemikiran keislamannya sangat terlihat pada masa sekarang, dimana HMI tidak mampu lagi melahirkan gagasan-gagasan baru yang dapat menjembatani masyarakat dalam menyerap kandungan nilai-nilai Islam yang masih harus digali secara terus menerus. Perbedaannya terletak pada sifat penelitiannya, yakni bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Keenam, skripsi Edi Supri Yanto tentang Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia studi atas Peran HMI MPO Cabang Yogyakarta tahun 1998-2004²⁸. Skripsi tersebut berangkat dari suatu pandangan bahwa keberadaan gerakan mahasiswa dalam konstelasi sosial-politik di negeri ini tak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaan gerakan mahasiswa menjadi pertimbangan oleh kelompok kepentingan yakni negara. Sebagai organisasi yang memiliki massa pendukung yang besar, HMI MPO

²⁸ Edy Supri Yanto, *Gerakan Mahasiswa Dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia; Studi atas Peranan HMI MPO Cabang Yogyakarta Tahun 1998-2004*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Cabang Yogyakarta mengalami proses panjang dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam di dalam realitas sosial khususnya Indonesia. Kelompok ini juga ikut merespon dalam proses penegakan demokrasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa HMI MPO tetap berasaskan Islam dengan tujuan membentuk insan *ulul albab*, mempertahankan aqidah dan identitas Islam dan ikut mewujudkan masyarakat yang *baldah tayybah*. Karakteristik HMI MPO berisikan unsur – unsur ideologis, yaitu komitmen tinggi terhadap Islam, aktivitasnya mengutamakan intelektual, membatasi politik praktis dan mengutamakan pengkaderan. Konsep demokrasi yang digunakan HMI MPO yaitu suatu konsep politik yang memiliki kedaulatan rakyat terbatas, karena pada esensinya kekuasaan atau keadaulatan tertinggi hanya ditangan Allah SWT.

Sebagai gerakan mahasiswa, peran HMI MPO cabang Yogyakarta dalam menegakkan demokrasi cukup memberi nilai baik dalam kurun waktu 1998 hingga 2004. HMI MPO cabang Yogyakarta telah melakukan banyak hal dalam merespon berbagai persoalan aktual saat itu serta melakukan *pressure* atas kebijakan dan langkah-langkah pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, diantaranya dengan menggelar aksi demonstrasi, aksi keprihatian, aksi solidaritas, diskusi dan menyampaikan pernyataan sikap. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada teori yang penyusun gunakan, yakni menggunakan teori kontruksi sosial.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian, perlu adanya teori yang melandasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial yang dipopulerkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman. Selain itu, pada bagian kerangka teori ini penulis uraikan juga beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan kata kunci pada penelitian ini.

a. Teori Konstruksi Sosial

Untuk menganalisis proses peran intelektual PB HMI dalam membangun demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru, penulis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini dimaksudkan sebagai satu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis) yang lebih menekankan pada tindakan manusia sebagai realitas sosial dan aktor yang kreatif. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti konsep, kesadaran umum dan wacana publik sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

Suatu sosiologi pengetahuan menekuni tidak hanya variasi empiris dari pengetahuan dalam masyarakat-masyarakat manusia, tetapi juga proses-proses dengan mana setiap perangkat pengetahuan, (*body of knowledge*)

pada akhirnya ditetapkan sebagai kenyataan sosial.²⁹ Sosiologi pengetahuan menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam suatu masyarakat, terlepas dari persoalan kesahihan atau ketidaksahihan yang paling dasar dari pengetahuan itu. Karena, sejauh semua pengetahuan manusia dikembangkan, dialihkan dan dipelihara dalam berbagai situasi sosial, sosiologi pengetahuan harus memahami bagaimana proses-proses itu dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu kenyataan dimasyarakat. Dengan kata lain, bahwa sosiologi pengetahuan menekuni analisa pembentukan kenyataan oleh masyarakat (*social construction of reality*).³⁰

Pendapat Berger tentang konstruksi sosial adalah bahwa kenyataan dan pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi sosial. Teori tersebut terkandung pemahaman bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial dan bahwa sosiologi pengetahuan harus menganalisa proses terjadinya hal itu. Sedangkan kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia; sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.³¹

²⁹ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES, 1990. Hlm, 4.

³⁰ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* Hlm, 4

³¹ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan* Hlm, 1.

Dalam teori tersebut, Berger ingin membuktikan bahwa masyarakat merupakan kenyataan obyektif dan sekaligus kenyataan subyektif.³² Sebagai kenyataan obyektif, individu berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya; sedangkan sebagai kenyataan subyektif, individu berada didalamnya di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Masyarakat sebagai realitas obyektif dan subyektif menempatkan individu sebagai bagian dari pembentukan fakta sosial yang ada di masyarakat, artinya individu yang membentuk masyarakat dan masyarakat yang membentuk individu. Maka itu, kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan objektif dan sekaligus subjektif.³³

Perhatian sosiologi terhadap kenyataan dan pengetahuan dibenarkan oleh fakta relativitas sosial. Sebagaimana diilustrasikan oleh Berger, bahwa apa yang nyata bagi seorang biarawan Tibet mungkin saja tidak nyata bagi seorang pengusaha Amerika Serikat. Pengetahuan penjahat berbeda dengan pengetahuan kriminolog.³⁴ Sehingga, tampak ada pengaruh timbal balik yang terlihat dari keterkaitan antara individu dan masyarakat, yang menurut Berger memiliki hubungan dasar dan dipahami sebagai satu proses yang berdialektika (*interplay*). Proses dialektika tersebut oleh Berger dibagi menjadi tiga fase, yaitu eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi.³⁵

³² I.B Putera Manuaba, *Memahami Teori Kontruksi Sosial*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 21, Nomor 3:221-230. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010)

³³ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan.....* Hlm, 28-65.

³⁴ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan.....* Hlm, 3.

³⁵ Geger Riyanto, *Peter L Berger "Perspektif Meta Teori Pemikiran*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), hlm. 36.

Produk aktivitas manusia yang berupa produk-produk sosial terlahir dari eksternalisasi manusia. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Eksternalisasi merupakan keharusan antropologis, keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Manusia selalu hidup dalam kolektivitas dan akan kehilangan kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Aktivitas manusia dalam membangun dunia pada hakikatnya merupakan aktivitas kolektif. Kolektivitas itulah yang melakukan pembangunan dunia, yang merupakan realitas sosial.

Dalam eksternalisasi tersebut terjadi proses pemberian tanggapan pada stimulus atau rangsangan yang berasal dari luar individu dan apabila tindakan tersebut dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka tindakan tersebut akan diulang-ulang.³⁶ Dalam tahap obyektifikasi, yang sekaligus pelembagaan dan legitimasi telah membentuk kesadaran logis dalam diri manusia, sehingga merumuskan terjadinya fakta tersebut karena adanya kaidah yang mengaturnya. Menurut Berger dan Luckmann, semua aktivitas manusia yang terjadi dalam eksternalisasi, dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi).³⁷ Kelembagaan berasal dari proses pembiasaan atas aktivitas manusia. Setiap tindakan yang sering diulangi,

³⁶ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial "dari Klasik hingga Postmodern"*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 153-154.

³⁷ Peter L Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan.....* Hlm, 75-76.

akan menjadi pola. Sehingga, pada tahap ini pemahaman yang ada dalam masyarakat menjadi realitas objektif.

Selanjutnya adalah proses internalisasi sekaligus momen sosialisasi. Melalui internalisasi, masyarakat dapat dipahami juga sebagai kenyataan subyektif. Internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Sehingga, dengan melalui proses internalisasi ini manusia menjadi hasil produk yang dibentuk oleh masyarakat. Internalisasi berfungsi mentransformasikan institusi sebagai realitas, sehingga dengan demikian individu menjadi anggota masyarakat dengan melakukan proses sosialisasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar institusi dapat berdiri kokoh dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan ditetapkan sebagai kenyataan. Menurut Berger dan Luckmann, konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.

2. Definisi Operasional

a. Intelektual

Dalam pengertian bahasa, intelektual berarti cendekiawan atau orang yang cerdas, berakal dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, memiliki daya akal budi serta totalitas pengertian atau kesadaran, terutama

menyangkut pemikiran atau pemahaman.³⁸ Antonio Gramsci merupakan salah satu tokoh dunia dalam bidang kajian tentang intelektual. Dalam tradisi teori kritik, disebut sebagai pemikir besar setelah marx.³⁹

Gramsci menggunakan pendekatan yang menempatkan bahwa kaum intelektual merupakan bagian dari kelas itu sendiri, yang kemudian konsepnya dikenal dengan *organic intellectuals*. Gramsci mengatakan bahwa setiap orang adalah intelektual, semua orang menggunakan intelektualnya dalam tingkatan tertentu, perbedaan terdapat pada derajatnya, bukan jenisnya.⁴⁰ Kelompok intelektual tersebut merupakan kelompok dengan badan penelitian dan studinya yang berusaha memberikan refleksi atas keadaan namun terbatas untuk kepentingan kelompoknya sendiri.⁴¹ Kelompok ini kemudian menginspirasi tentang pemihakan dan peran kaum intelektual dalam transformasi sosial.

Dalam konteks ini, Gramsci melihat pentingnya kehendak dan tekad revolusioner itu ada dalam hati sanubari kaum proletariat. Hal ini dilakukan untuk menumbangkan kekuasaan kaum borjuasi yang telah merasuk dalam sebuah dimensi kehidupan masyarakat. Sehingga, diperlukan kelompok intelektual dan partai revolusioner untuk mewujudkan sosialisme. Namun, menurut Gramsci, sebagaimana yang dikutip oleh Yudi Latif,

Sangat problematik jika harus mengidentifikasi para intelektual sebagai orang-orang yang memiliki kualitas

³⁸ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001. Hlm. 437.

³⁹ Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Hlm.130.

⁴⁰ Antonio Gramsci, *Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Hlm, 3-4.

⁴¹ Arizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan untuk Melawan Domonisai*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001. Hlm 2-3.

khusus bersifat bawaan (*innate*). Dalam pandangannya, setiap orang menjalankan beberapa bentuk aktivitas intelektual, namun tidak semua orang dalam masyarakat menjalankan fungsi intelektualnya.⁴²

Keberadaan kaum intelektual bukanlah di menara gading, elitis, melainkan harus menyatu dan berada di sisi kaum buruh. Gramsci melihat, perubahan sosial bukanlah semata-mata upaya menyangkut masalah kekuatan ekonomi dan fisik, tapi juga melibatkan perebutan wilayah kebudayaan dan ideologi. Sebuah upaya masyarakat bawah untuk membebaskan diri mereka dari budaya kaum borjuasi dan untuk membangun nilai budaya mereka sendiri bersama-sama kaum tertindas dan lapisan intelektual yang berpihak.

Maka, Gramsci dalam menentukan faktor penentu kategorisasi sebagai intelektual atau hanya pekerja manual itu terletak pada fungsi sosialnya, berbeda dengan pandangan kaum liberal yang melihat kaum intelektual sebagai sesuatu yang berada diatas, diluar masyarakat. Menurutnya, bahwa tidak ada organisasi tanpa intelektual, dengan kata lain, tanpa pengorganisian dan pemimpin, tanpa aspek teoritis dari kesatuan teori dan praktik yang dalam konkretnya terwujud dalam strata orang-orang yang berspesialisasi dalam elaborasi konseptual dan filosofis.⁴³

Karena bagi Gramsci, perubahan sosial tidak semata-mata sebagai perebutan kekuasaan politik, melainkan suatu perebutan kekuasaan budaya dan ideologi⁴⁴. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyusunan dan

⁴² Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*.....Hlm. 20-21.

⁴³ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*.....Hlm. 36-37.

⁴⁴ Antonio Gramsci, *Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara*.Hlm, 3-4

pengorganisasiaan suatu lapisan intelektual yang mengekspresikan pengalaman aktual masyarakat dengan keyakinan dan bahasa terpelajar. Ini memiliki makna kaum intelektual organik akan menghadirkan suara-suara kepentingan masyarakat bawah dengan bahasa budaya tinggi sehingga, pandangan dunia, nilai-nilai dan kepercayaan kelas bawah meluas ke seluruh masyarakat dan menjadi bahasa universal.

Pembahasan mengenai intelektual organik (gramsci), menurut peneliti sangat tepat dalam mengkaji peran Intelektual Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dalam kehidupan demokrasi dan dinamika politik di Indonesia pasca orde baru. Hal ini mengingat sebagai mahasiswa, kader-kader HMI telah menunjukkan fungsinya sebagai perubahan sosial dimasyarakat selama ini. Mereka tidak hanya berkuat diatas menara gading sebagai pengamat saja. Namun, mereka berproses dan menjadi arsitektur peradaban, menggagas, merencanakan dan melaksanakan perubahan itu sendiri.

Namun, untuk menambah dinamika keilmuan Islam, peneliti menambahkan gagasan intelektual menurut Ali Syari'ati. Dalam khazanah Intelektual Muslim, Ali Syari'ati yang merupakan tokoh dunia dengan kajiannya mengenai intelektual atau *rausyanfikir* (pemikir yang tercerahkan, pemikir bebas).⁴⁵ Secara historis istilah tersebut menunjuk pada pengertian

⁴⁵ Dalam bahasa Persia, *rausyanfikir* artinya pemikir yang tercerahkan. Dalam bahasa Inggris terkadang disebut *intellectual* atau *free thinkers*. *Rausyanfikir* berbeda dengan ilmuwan. Seorang ilmuwan menemukan kenyataan, seorang *rausyanfikir* menemukan kebenaran. Ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya, *rausyanfikir* memberikan penilaian sebagaimana seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal, *rausyanfikir*- seperti para nabi- berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya, *rausyanfikir* harus melibatkan diri pada ideologi. Sejarah, Syari'ati dibentuk oleh kaum *rausyanfikir*. Lihat Jalaluddin rakhmat, *Ali Syari'ati: Panggilan untuk Ulil Albab*, pengantar dalam Ali Syari'ati,

umum tentang intelektual sekular yang tumbuh di Iran, yakni kaum terpelajar dididik barat yang sekaligus mengagumi dan dipengaruhi oleh para filosof Eropa abad ke-18 yang dikenal dengan abad pencerahan.

Rausyanfikir merupakan kaum intelektual yang berpaham modernis dan berkencenderungan liberal, yang bekerja dan berfikir secara profesional, tetapi terpanggil untuk melakukan perubahan-perubahan politik, sosial maupun kultural. Maka, Jalaluddin Rakhmat dalam pengantarnya membedakan antara sarjana, ilmuan dan intelektual. Sarjana diartikan sebagai orang lulus dari perguruan tinggi dengan membawa gelar. Jumlahnya ini banyak, karena setiap tahun universitas memproduksi sarjana. Ilmuan adalah orang mendalami ilmu, baik dengan pengamatan maupun dengan analisisnya sendiri. Diantara sekian banyak sarjana, beberapa orang sajalah yang kemudian berkembang menjadi ilmuan. Sebagian besar terbenam dalam kegiatan rutin dan menjadi tukang-tukang profesional.

Kaum intelektual bukanlah sarjana yang hanya menunjukkan kelompok orang yang sudah melewati pendidikan tinggi dan memperoleh gelar sarjana. Mereka juga bukan ilmuan yang mendalami dan mengembangkan ilmu penalaran dan penelitian. Mereka adalah kelompok orang yang merasa terpanggil untuk memperbaiki masyarakatnya, menangkap aspirasi mereka, merumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami setiap orang, menawarkan strategi dan alternatif pemecahan masalah.⁴⁶

Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam, terj. Syafiq Bashri dan Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1994. Hlm. 14-15.

⁴⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan, 1998. Hlm. 212.

Bagi syariat, tidak semua yang tercerahkan adalah intelektual dan semua intelektual yang meraih gelar akademis adalah orang yang tercerahkan. Yang dimaksud tercerahkan atau *rausyanfikir* adalah orang yang sadar akan keadaan kemanusiaan (*human condition*) dimasanya, serta *setting* kesejarahan dan kemasyarakatannya yang memberinya rasa tanggung jawab sosial. Mereka adalah individu-individu yang sadar dan bertanggung jawab, yang tujuan dan tanggung jawab utamanya adalah membangkitkan karunia Tuhan yang mulia, yaitu kesadaran diri dari rakyat jelata. Karena hanya kesadaran dirilah yang mampu mengubah rakyat yang statis dan bodoh menjadi kekuatan yang dinamis dan kreatif.

Ali Syari'ati menegaskan bahwa para pemikir pemikir yang tercerahkan adalah aktivis radikal yang menyakini dengan sungguh-sungguh dalam ideologi mereka dan menginginkan syahid demi perjuangan mereka. Misi yang akan dibangkitkan mereka adalah untuk membangkitkan massa yang tertidur dengan mengidentifikasi masalah nyata yang berupa: kemunduran masyarakat Islam, juga agama dan keadilan sebagai solusi nasional untuk menguliti masalah yang mencuat dalam masyarakat.⁴⁷ Dalam konteks ini, HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam memiliki peran dan fungsi yang memiliki tanggung jawab sebagai insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

b. Gerakan Mahasiswa

Bagi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, kaum intelektual memiliki peran penting dalam perjuangan melawan penjajah. Kaum intelektual

⁴⁷ Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Hlm. 160.

tersebut merupakan mahasiswa yang melakukan gerakan kemerdekaan dan yang sedang belajar diluar negeri yang menciptakan atau membantu menciptakan partai nasionalis baru. Pada penelitian mengenai elit Indonesia baru, ada penyebaran gagasan radikal dari kalangan mahasiswa dan pengaruh kuat intelektual untuk berfikir politis dan juga menunjukkan kaum terpelajar Indonesia merupakan partisipan aktif dalam gerakan anti pejahah.⁴⁸

Mahasiswa merupakan sebuah golongan elit yang dianggap mewakili masyarakat dan zamannya sendiri-sendiri, sesuai dengan porsi dan peranannya yang tentu saja pada setiap zaman dan generasi memiliki wawasan, peranan dan porsi yang tidak sama bahkan berbeda.⁴⁹ Hal ini bisa dilihat dalam pasang dan surutnya gerakan mahasiswa, sebagai sebuah gerakan yang anti kolonialis maupun sebagai sebuah gerakan yang revolusioner, hingga kemudian menjadi sebuah gerakan yang berkehendak sebagai golongan kaum reformis atau pembaharu menuju Indonesia baru.

Dalam golongan kaum cendikiawan, mahasiswa telah dipandang sebagai pihak yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi warga kaum

⁴⁸ T.B Bottomore, *Elit dan Masyarakat*, Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006. Hlm,123.

⁴⁹ B.M. Diah, *Masalah Begitu Besar, Tapi Generasi Muda tak cukup Siap*. Prisma 7 Nomor Khusus, 1976, hlm. 52. Menurut B.M. Diah, dalam pengertian sosiologis dan politis elite adalah *the rulling clas*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, dalam suatu hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite aalah suatu produk dari masyarakat. Demikian juga antara elite dengan elite sesudah atau sebelumnya senantiasa ada interkomunikasi, sehingga kreasi ataupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau dijelmakan kedalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya. Demikian pula halnya dengan gerakan mahasiswa, ia juga merupakan bentuk elit tertentu yang sifatnya informal, karena memang tidak memiliki kekuatan atau power secara formal. Lihat juga konsep pemahaman tentang *the rulling class* yang dikemukakan Selo Soemardjan dalam kata pengantarnya untuk Suzanne Kaller, *Dallam Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta, Rajawali Pers dan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1984. Hlm, xv.

intelektual sepenuhnya.⁵⁰ Mahasiswa memungkinkan untuk dianggap telah mampu melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pemula dikalangan kaum intelektual dan kekuatan massa.

Ada lima kategori fungsi kaum cendekiawan menurut Shils, yaitu mencipta dan menyebarkan kebudayaan tinggi, menyediakan bagan-bagan nasional dan antar bangsa, membina keberdayaan bersama, mempengaruhi perubahan sosial dan memainkan peran politik. Jika diukur dalam tingkat intensitasnya, fungsi intelektual yang telah dilakukan mahasiswa diantaranya memainkan peranan politik, mempengaruhi perubahan sosial dan membina keberdayaan bersama yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan aktifitas politik, sosial budaya, ideologi dan ilmiah.⁵¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan pengertian gerakan yakni suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan baik dalam lapangan sosial maupun politik.⁵² Gerakan mahasiswa dengan segala kelebihan dan kekurangannya bisa diakui bahwa tidak semua gerakan mahasiswa membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Dengan modal pendidikan dan pengetahuan, mahasiswa cenderung melibatkan diri dalam proses perubahan sosial ditengah masyarakat maupun berperan sebagai kontrol sosial.

⁵⁰ Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press. Hlm, 85. Dalam pembahasan kaum intelektual, diantaranya ada dalam Dick Hartoko, *Golongan Cendikia*, Jakarta: Gramedia, 1980. Analisis mengenai peran mahasiswa sebagai kaum cendekiawan ditulis oleh Arif Budimana, *Peran Mahasiswa sebagai Intelegensia*, Hlm. 70-83.

⁵¹ Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*..... Hlm. 86.

⁵² Petter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1990. Hlm. 272.

Di banyak negara termasuk salah satunya di Indonesia, gerakan mahasiswa memiliki suatu ciri khas dalam setiap aktivitasnya sebagai fungsi kontrol. Meski gerakan mahasiswa selalu menjanjikan gerakan moral, walaupun terkadang keberadaannya seringkali dipadukan dengan gerakan politik. Bonar Tigor Naipospos mengulas keberadaan Gerakan Mahasiswa di Indonesia, menyatakan bahwa;

Gerakan Mahasiswa adalah hasil dialektika dinamis antara kesadaran subjektif dengan realitas objektif (yang representasinya adalah dinamika struktur ekonomi, politik dan negara). Berbeda dengan kelompok sosial lainnya, kesadaran sosial mahasiswa ditentukan oleh gagasannya bukan karena keberadaannya. Latar belakang sosial dan lingkungan pergaulan sebagian besar mahasiswa berjarak dengan kenyataan sosial. Retorika populisme dan kritisisme muncul bukan dikarenakan berbenturan dengan persoalan masyarakat sehari-hari, tetapi lebih dipengaruhi oleh pemikiran politik dan perkembangan teori pembangunan yang menjadi wacana tandingan dari kebijakan pembangunan yang ditempuh selama itu.⁵³

Sebagaimana yang diungkapkan Taufik Abdullah, setiap generasi memiliki sejarahnya masing-masing dan paralelisme dalam sejarah pada dasarnya ada batasnya. Terserapnya kaum intelektual ke dalam lembaga-lembaga yang terorganisir, seperti universitas, birokrasi pemerintah, perusahaan bisnis merupakan konsekuensi dari perubahan zaman, baik di negara yang menganut sistem liberal maupun totaliter. Dalam pandangan Drucker, organisasi-organisasi produksi dimana para intelektual sebagai *knowledge worker* tersebut bekerja, telah memusatkan diri pada fungsi tunggal yaitu menciptakan kekayaan, memberi jasa tertentu, merawat orang sakit,

⁵³ Bonar Tigos Naipospos, *Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik, Kearah Gerakan Rakyat?* dalam Majalah Prisma No. 7, Edisi Juli 1997, Hlm. 18.

mengurus orang miskin, menyebarkan berita dan opini, atau menyebarkan pendidikan dan pengetahuan.⁵⁴

c. Demokrasi

Demokrasi memiliki berbagai macam istilah.⁵⁵ Dalam wacana politik modern, demokrasi lebih menekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada ditangan rakyat.⁵⁶ Secara harfiah, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sangat terbuka dalam arus akuntabilitas publik.

Demokrasi pada prinsipnya anti terhadap otoritarianisme dan kolusi atau konspirasi yang kemungkinan muncul dalam sistem monarki atau oligarki. Abraham Lincoln (1863) seorang negarawan Amerika mendefinisikan demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).⁵⁷ Dengan demikian, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan fungsi kontrol dari semua unsur kekuasaan yang ada, sehingga akan menumbuhkan keadilan (*justice*) yang secara sistematis dapat memberikan kebaikan di masyarakat.

Bagi kalangan masyarakat modern, demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan yang terbaik. Bagi pemerintah, termasuk rezim totaliter sekalipun, akan berusaha meyakinkan masyarakatnya bahwa mereka menganut sistem politik demokratis, atau sekurang-kurangnya

⁵⁴ Hendrajit, "Memahami Pergerakan Peran Intelektual dalam Era Baru", dalam Team Editor Misaka (ed.), *Kebebasan Cendekiawan: Refleksi Kaum Muda*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Pustaka, 1996. Hlm, 51.

⁵⁵ Istilah "demokrasi" berasal dari Athena, Yunani Kuno pada abad ke-5 SM yakni berasal dari dua kata, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat.

⁵⁶ Pengertian ini dijelaskan Sidney Hook, "Democracy", dalam *The Encyclopedia Americana*, edisi Internasional. New York: Americana Corporation, 1975. Hlm, VIII: 684.

⁵⁷ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Hlm, 29.

tengah berproses ke arah itu.⁵⁸ Kemudian menjadi wajar ketika ada ketergantungan terhadap demokrasi, yang saat ini menjadi salah satu ukuran penting di dalam tata hubungan dan pergaulan internasional.

Ada dua konsep yang dominan dalam diskursus demokrasi modern yakni demokrasi Barat dan demokrasi komunisme. Pada konsep demokrasi Barat lebih menekankan pada elemen prosedural bagi sebuah struktur demokratis. Sedangkan demokrasi komunisme lebih menekankan pada elemen substantif. William Ebestein mengilustrasikan perbedaan ini pada kasus pemaknaan demokratisasi untuk Jerman pasca perang Dunia Kedua, bahwa

“ setelah berhasil melumpuhkan kekuatan Jerman pada Perang Dunia II, Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Uni Soviet yang tergabung dalam kekuatan sekutu menguasai negeri itu. Negara-negara sekutu itu sepakat untuk mendemokratisasi Jerman. Namun, ketiga negara Barat dan Uni Soviet tidak sepakat tentang apa makna dan implementasi dari gagasan demokratisasi itu. Bagi Barat, demokratisasi berarti prinsip atau metode-metode dasar serta proses dalam kehidupan publik Jerman, seperti pemilihan umum yang bebas, kebebasan pers, persamaan dimuka hukum, kebebasan berbicara dan berserikat serta kebebasan beroposisi. Sedangkan menurut komunis, demokratisasi Jerman berarti menguatkan pemerintahan yang akan mewujudkan apa yang mereka klaim sebagai ‘kepentingan terbaik’ bagi masyarakat Jerman. Dalam kacamata Komunis, kepentingan terbaik itu tidak lain adalah komunisme. Karena itu, menurut Uni Soviet, demokratisasi Jerman berarti mengakhiri kapitalisme dan menggantikannya dengan komunisme.⁵⁹

Bagi Barat, rakyat adalah hakim terbaik bagi kepentingan mereka sendiri. Karena itu, rakyat harus diberi kebebasan penuh untuk mengekspresikan pandangan dan aspirasinya. Sedangkan dalam teori komunis,

⁵⁸ Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, Jakarta: LP3ES, 1994. Hlm, 3.

⁵⁹ William Ebestein, “Democracy” dalam William D. Halsey dan Bernard Johnston (ed.), *Collier’s Encyclopedia*. New York: Macmillan Educational Company, 1998. Hlm, VIII: 76.

yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan adalah mereka yang mengetahui kebenaran, yaitu minoritas kecil yang berkuasa dalam partai komunis.⁶⁰

Sistem politik yang bisa disebut demokratis dalam pandangan Samuel P Huntington (2001) yakni ketika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.⁶¹ Kemudian, dalam sistem yang demokratis para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Selanjutnya dia mengatakan bahwa demokrasi juga memerlukan kebebasan sipil dalam aktivitas politik yang meliputi kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan menyampaikan informasi.

Dalam konteks Indonesia, gagasan mengenai demokrasi berangkat dari kesadaran kaum pergerakan di Indonesia awal abad ke-20 yang melihat keterbelakangan kondisi masyarakat dan bangsa yang tertindas oleh kolonialisme. Hal utama yang tampak muncul dari perjuangan kaum pergerakan adalah kesadaran terhadap hak dan kebebasan mengemukakan pikiran, berserikat, berkumpul dan berpendapat. Terjadinya penderitaan dan kesengsaraan disatu pihak, ketidakadilan, ketidaksamaan serta diskriminasi di lain pihak, telah membentuk kesadaran kaum pergerakan.⁶²

Para pendiri Republik ini – seperti Soekarno dan Hatta – merumuskan berbagai model demokrasi dalam konteks praktek politik di Indonesia. Jika Soekarno lebih cenderung dalam pemikiran sinkretisnya, sedangkan Hatta

⁶⁰ William Ebestein, "Democracy" dalam William D. Halsey dan Bernard Johnston (ed.), *Collier's Encyclopedia*..... Hlm, 76.

⁶¹ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Hlm, 51.

⁶² Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*,.... Hlm, 58.

lebih kagum dengan pada sosial demokrasinya. Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai bentuk demokrasi. *Pertama*, demokrasi parlementer (liberal) yang berlangsung pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1950-1959. *Kedua*, demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante kemudian mendeklarasikan demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1966. *Ketiga*, demokrasi Pancasila yang berlangsung pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1967-1998. *Keempat*, demokrasi pascatransi yang tengah berlangsung saat ini sejak terjadinya reformasi 1998.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan studi mengambil latar sejarah. Dalam sejarah organisasi atau masyarakat terdapat struktur sosial dan proses-proses sosialnya, termasuk juga perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta membahas pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiah.⁶³ Jadi, metode ini sangat cocok untuk memahami peran intelektual Pengurus Besar HMI periode 1997-1999 dalam membangun demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru.

⁶³ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013. Hlm, 6.

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti sesuatu dari segi prosesnya.⁶⁴ Sehingga ini menjadi relevan untuk meneliti apa pengaruh intelektual Pengurus Besar HMI periode 1997-1999 dalam dinamika demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistik untuk pengolahan data. Data yang di dapat langsung oleh penulis dari hasil penelitian di dapat dari wawancara langsung dengan narasumber yang sesuai dan data pendukung berupa literatur-literatur atau buku-buku yang relevan sesuai dengan penelitian yang dianggap sebagai bahan pendukung penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut;

a. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (orang diwawancarai) atau dengan kata lain, pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi secara lisan.⁶⁵

Penulis menggunakan metode wawancara untuk mengetahui secara langsung berbagai pandangan, opini dari beberapa Pengurus Besar HMI

⁶⁴ Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*..... Hlm, 7.

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983. Hlm, 128.

periode 1997-1999, khususnya mengenai informasi yang berkaitan dengan peran intelektual HMI dalam membangun demokrasi di Indonesia pasca orde baru.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti kata-kata tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶⁶ Atau pengumpulan data melalui data-data tertulis.⁶⁷

Dalam mengoprasionalakan tehnik ini, penulis menggunakan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku, media massa, laporan penelitian, konstitusi organisasi, surat keputusan maupun surat pernyataan yang ditulis oleh anggota organisasi. Semua data-data yang dikumpulkan tersebut adalah data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁶⁸

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2002. Hlm, 135.

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,..* Hlm, 136.

⁶⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,..* Hlm, 191.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini disebut sebagai prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat tertentu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.⁶⁹

Sebagaimana yang diungkapkan Winarno Surachmad, bahwa dalam setiap penelitian deskriptif maka data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.⁷⁰ Sehingga dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya, meski penyusun merupakan bagian dari aktivis HMI. Agar hasil penelitian ini mempunyai bobot yang tinggi dan tidak bias, maka dilakukan identifikasi sesuai dengan dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh dan relevan untuk diperhatikan. Dari fakta-fakta yang ditemukan, lalu dilakukan penafsiran, analisis dan intepretasi.

Adapun proses yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni dimulai dari pengumpulan data yang dibutuhkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah sesuai dengan pendekatan yang dipilih, kemudian dilakukan penyusunan data dengan memilih dan menggolongkan data dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data tersusun secara sistematis, dilakukan interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data. Interpretasi dilakukan untuk memperoleh kebenaran yang pada hakekatnya lebih didasarkan pada pengetahuan atau subjektivitas penyusun.

⁶⁹ Robert Bogdan, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992. Hlm, 20.

⁷⁰ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: CV. Tarsito, 1970. Hlm, 132.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup, yang disusun menjadi beberapa bab dan masing-masing terbagi atas beberapa sub-bab. Agar pembahasan komprehensif dan terpadu, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut;

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari tujuh sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Semua dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang HMI yakni pergulatan HMI dalam sejarah keindonesiaan yang terdiri ke dalam empat sub-bab, yaitu sejarah kelahiran HMI, garis ideologi organisasi, struktur kekuasaan organisasi serta sistem keanggotaan dan kaderisasi.

Bab ketiga, yakni membahas demokrasi sebagai realitas sosial, yaitu sejarah demokrasi di Indonesia, praktek demokrasi di Indonesia, peran intelektual PB HMI Periode 1997-1999 dan demokrasi sebagai realitas sosial.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis terhadap HMI dalam dinamika demokrasi di Indonesia yang terbagi menjadi tiga sub-bab, yaitu pendukung ideologi negara (Pancasila), mendorong sistem politik pro-demokrasi dan pembangunan *civil society*.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dalam penelitian dan ditutup dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan – pemahasan tersebut, akan ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Bagi HMI dalam merespon demokrasi tidak dengan mempertentangkan antara Islam dengan demokrasi. berbicara mengenai Indonesia maka berbicara Islam, berbicara Pancasila juga berbicara tentang Islam. Keduanya kompatibel saling melengkapi dan bagi HMI sudah selesai berbicara tentang keislaman dan Keindonesiaan. Maka, upaya yang dilakukan intelektual dalam PB HMI dalam membangun demokrasi dilakukan dengan membuat beberapa langkah strategis, dengan membuat buletin, jurnal, membuat diskusi dan pelatihan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemahaman bersama tentang demokrasi (proses eksternalisasi). Pemahaman ini kemudian dilegitimasi yang disandarkan pada Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan (proses objektifikasi). Dalam membangun demokrasi, HMI tidak hanya berhenti pada perjuangan penurunan rezim orde baru, tapi memasukkan ide-ide demokrasi. Namun juga di internalisasikan dalam RUU Politik. Dengan keberadaan Anas Urbaningrum sebagai Tim revisi UU Politik merupakan upaya untuk mensosialisasikan ide dan gagasan tentang demokrasi (proses internalisasi).
2. Pengaruhnya terhadap dinamika demokrasi di Indonesia yakni *pertama*, sebagai pendukung ideologi Pancasila. Strategi PB HMI untuk menerima Pancasila

sebagai semakin mendekatkan HMI kepada struktur masyarakat yang kuat yakni negara. Relasi dengan negara dibangun dengan menjaga dan melakukan komunikasi dengan legislatif dan eksekutif. *Kedua*, membangun sistem politik yang pro-demokrasi yakni dengan hubungan erat antara kaum intelektual organik dengan kelas mereka merupakan sebuah proses yang dialektis; mereka melahirkan bentuk dari pengalaman kelas dan pada saat bersamaan menanamkan kesadaran pada rakyat. Terlibatnya Anas Urbaningrum dalam Tim Revisi UU Politik yang merupakan tuntutan reformasi dapat mendorong sistem politik Indonesia lebih demokratis. *Ketiga*, pembangunan *Civil Society*, dengan terlibatnya orang-orang HMI di dalam pemerintahan, telah menjadi pekerja langsung membangun sistem demokrasi. Sedangkan *Civil society* dan demokrasi saling bergantung sama lain, jika *civil society* kuat maka demokrasi akan tumbuh dan berkembang dengan baik. HMI sebagai organisasi keagamaan yang berbasis Islam mampu menerima demokrasi sebagai ajaran Islam. Penelitian ini menjadi antitesis dari kelompok-kelompok yang menolak demokrasi. HMI menerima bahkan mendorong demokrasi demi untuk kepentingan nasional. Kontribusi pemikiran dan kepemimpinan melalui keterlibatan elit-elitnya di dalam membangun demokrasi dan pergumulan penegakan demokrasi di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Dalam menganalisis peran HMI, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan berbagai teori lainnya.
2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang masih memiliki kesadaran kolektif, selayaknya berupaya untuk memperkuat tradisi dalam menghasilkan ide-ide dan gagasan sebagai bentuk tanggung jawab moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*, Jakarta: LP3ES.
- Alfian, Alfian. 2013. *HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) 1963-1966 Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*, Jakarta: Kompas.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Fakih, Mansour. 2011. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 2002. *Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Terjemahan oleh Ketut Arya Mahardika dari *The Third Way The Renewal of Social Democracy*, Jakarta: Gramedia.
- Gellner, Ernest. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Terjemahan oleh Asril Marjohan dari *The Third Wave Democratization in The Late Twentieth Century*, Jakarta: Grafiti.
- Koentjaraningrat. 1982. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Bandung: CV Transito.
- Latif, Yudi. 2007. *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Bandung: Mizan.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jakarta: LP3ES.

- Maleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutahir, Arizal. 2001. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan untuk Melawan Domonisai*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Islam Alternatif: Ceramah-Ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan.
- Saleh, Hasanuddin M. 1996. *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*. Yogyakarta: Kelompok Lingkar Studi dan Pustaka Pelajar.
- Satria, Hariqo Wibawa. 2011. *Lafran Pane: Jejak Hayat dan Pemikirannya*. Jakarta: Penerbit Lingkar.
- Syari'ati, Ali. 1994. *Ideologi Kaum Intelektual, Suatu Wawasan Islam*, terj. Syafiq Bashri dan Haidar Baqir, Bandung: Mizan.
- Sitompul, Agus Salim. 2008. *Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)*, Jakarta: CV. Misaka Galiza.
- Sitompul, Agussalim (ed). 2008. *HMI Mengayuh Diantara Cita dan Kritik*, Jakarta: CV Misaka Galiza.
- Seohadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Solichin, 2011. *Wasiat Sang Begawan, Pesan-Pesan Nurcholis Majid*, Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation.
- Supriyadi, Eko. 2003. *Sosialisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanja, Victor. 1982. *HMI Sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Urbaningrum, Anas. 2014. *Janji Kebangsaan Kita*. Jakarta: Penerbit Sierra.

Zakaria, Rusydy dkk (ed.). 2012. *Membangkitkan Pengkaderan Intelektual Setengah Abad HMI Cabang Ciputat*, Ciputat: UIN Jakarta Press.

Zamhari, Muhammad Hari. 2004. *Agama dan Negara, Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Majid*. Jakarta: Raja Grafindo.



LAMPIRAN-LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN PB HMI PERIODE 1997-1999



Gambar 1. Studi Nasional Mahasiswa Indonesia PB HMI dengan tema Urgensi Reformasi bagi Pembangunan Bangsa yang Bermartabat. Dalam foto dari kiri Michel El Qudsi, Adi Sasono dan Ryaas Rasyid. (dok. Dwiki setiyawan)



Gambar 2. Launching Jurnal Madani PB HMI, dari kiri Susilo Bambang Yudhoyono, M. Alfian Alfian. (dok. Dwiki setiyawan)



Gambar 3. Bedah Buku Bakornas Lembaga Pers PB HMI, dari kiri Anas Urbaningrum, Suparji Ahmad, Andi Malarangeng, J Kristiadi. (dok. Dwiki setiyawan)



Gambar 4. Kolokium II Pembaharuan Pemikiran Islam PB HMI, dengan tema “Revitalisasi Pemikiran dan Peran Politik Ummat Islam Memasuki Era Baru. Dari kiri Hajrianto H Tohari, Michael el Qudsi, Anas Urbaningrum. (dok. Dwiki setiyawan)

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Wahyu Hidayat
Tempat, Tanggal lahir : Candra Kencana, 20 Februari 1987
Jenis Kelamin : Pria
Status Perkawinan : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Kampung Candra Kencana, RT 06 RW 05 Kec. Tulang
Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Prov.
Lampung.
Alamat Sekarang : Gendeng GK IV/443, Baciro, Kota Yogyakarta.
E-mail : wahyu.fa@gmail.com
No Handphone : 0813 2827 8190, 0857 6868 8484

Pendidikan formal:

- SDN 05 Candra Kencana Tahun 1992-1998
- SMP Muhammadiyah 01 Tulang Bawang Tengah Tahun 1998-2001
- SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah Tahun 2001 - 2004
- IPPI Program Diploma 1 Jur. Programmer Komputer Tahun 2004 – 2005
- UIN Sunan Kalijaga D3 Jur. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Tahun 2005 – 2009
- UIN Sunan Kalijaga S1 Jur. Sosiologi Agama, Tahun 2010 – 2015

Yogyakarta, 05 Februari 2015

Wahyu Hidayat